



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan dan merupakan bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terhadap penggunaan anggaran dan sumber daya terkait pelaksanaan amanah yang diemban. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas akuntabilitas kinerja wajib menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKjIP adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKjIP, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya.

Penyusunan LKjIP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi serta analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Mataram, Februari 2023
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd
NIP. 19710124 199801 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum	2
1.2. Aspek Strategis Organisasi	4
1.3. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	6
1.4. Struktur Organisasi	8
BAB II	17
PERENCANAAN KINERJA	17
2.1. Rencana Strategis	17
2.2. Tujuan dan Sasaran	17
2.3. Indikator Utama	19
2.4. Penilaian Kinerja Tahun 2022	20
BAB III	24
AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1. Capaian Kinerja Dikbud NTB Tahun 2022	24
3.2. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019 s.d 2022	25
3.3. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan	26
3.4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	33
3.5. Program /Kegiatan Penunjang Keberhasilan	34
3.6. Realisasi Anggaran	35
3.7 Realisasi Anggaran Dinas Dikbud tahun 2022 Perbidang dan UPTD	36
3.8 Realisasi Anggaran Dinas Dikbud Tahun 2018 s/d tahun 2022	47
3.9 Efisiensi Anggaran Dinas Dikbud Tahun 2022	48
BAB IV	
PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	67
4.2. Langkah ke depan Kinerja Dinas Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17
Tabel 2 Indikator Kinerja Utama	19
Tabel 3 Target Dan Realisasi Capaian Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2022	24
Tabel 4 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019 s.d 2022	25
Tabel 5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra	26
Tabel 6. Permasalahan Dalam Pencapaian Kinerja Dikbud NTB Tahun 2022	28
Tabel 7. Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja	34
Tabel 8. Distribusi Anggaran APBD Dinas Dikbud Provinsi NTB tahun 2022	35
Tabel 9. Realisasi Anggaran Dikbud NTB per bidang dan per subbagian	36
Tabel 10. Realisasi Anggaran Dinas Dikbud Provinsi NTB Tahun 2018 s.d 2023	47
Tabel 11. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Berdasarkan Pergub Nomor 53 Tahun 2021	9
Gambar 2. Struktur Organisasi Cabang Dinas PerGub Nomor 91 Tahun 2022	9
Gambar 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	22

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. Laporan Akuntabilitas Kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam *dokumen perjanjian kinerja* dan *dokumen perencanaan*. Selain itu, Dokumen LKjIP terkait dengan dokumen lain yaitu RPJMD, Renstra OPD, Renja OPD, Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja , dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan

Dalam rangka menjamin terwujudnya sebuah accountability atau akuntabilitas, dalam sebuah organisasi diperlukan pemberdayaan semua komponen yang bekerja dalam sebuah system. Sedangkan untuk mengetahui akuntabilitas kinerja, diperlukan sebuah laporan kinerja. Dalam hal ini, selain sebagai kewajiban, Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat bermaksud untuk menyajikan sebuah laporan kinerja yang menggambarkan kinerja utuh, yang telah tersusun secara systemic dalam organisasi, terukur, dan tergambar secara nyata tingkat tanggungjawab setiap pemangku kegiatan di lingkungan Dikbud Provinsi NTB. Dengan demikian dapat disebut accountable.

Sebagai gambaran tentang Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat, berikut ini dipaparkan tentang organisasi Dikbud NTB, potensi dan kekuatan atau aspek – aspek strategis dalam organisasi dalam menghadapi atau menangani berbagai permasalahan pendidikan di NTB. Personel yang bekerja dalam struktur organisasi berikut dengan tugas dan fungsi mereka dalam mengelola pendidikan di Nusa Tenggara Barat.

1.1. Gambaran Umum

Dalam mengemban tujuan dan amanah konstitusi yaitu untuk mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat, layanan pendidikan dilaksanakan secara terprogram, berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan pendidikan skala nasional. Sebagai

lembaga atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB membantu Gubernur Provinsi NTB dalam melaksanakan Tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2021, yaitu Membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan azas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.

Dalam Visi dan Misi Gubernur Provinsi NTB yaitu ingin mewujudkan “*NTB Gemilang*”. Khusus untuk pendidikan tertuang dalam misi ke 3 (tiga) yaitu “*NTB Sehat dan Cerdas*” selanjutnya, Dikbud NTB menentukan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah dengan rumusan tujuan *Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan, Strategi meliputi Peningkatan Pemerataan Pendidikan; Peningkatan akses, mutu, dan daya saing pendidikan; dan Peningkatan kualitas data.*

Penerapan visi dan misi tersebut mencakup seluruh penduduk NTB yang mencapai 5,473,507 jiwa pada tahun 2022 dan khusus penduduk kelompok usia sekolah menengah (16 - 18 tahun) mencapai 216.848. Jumlah Sekolah Menengah mencapai 150 SMA Negeri, 192 SMA Swasta, 99 SMK Negeri, 231 SMK Swasta, 18 SLB Negeri, dan 32 SLB Swasta sehingga total jumlah Sekolah mencapai 723 Sekolah. Rasio Murid dengan Guru Tingkat SLB adalah 1 : 6, Rasio murid dengan Guru pada tingkat SMA adalah 1 : 12 dan Rasio Murid dengan guru tingkat SMK adalah 1 : 10.

Itulah gambaran singkat sasaran pembangunan bidang pendidikan di NTB belum termasuk Anak Berkebutuhan Khusus yang mencapai 8,524 jiwa sampai dengan tahun 2022. Sasaran usia sekolah menengah yang terdaftar di Madrasah Aliyah dan Pendidikan Kesetaraan lainnya yang tidak mungkin diabaikan, kesejahteraan guru tidak tetap, ruang kelas dan fasilitas belajar Madrasah Aliyah dan program Kesetaraan lainnya.

Dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB telah melaksanakan sejumlah program perluasan akses Pendidikan Menengah Atas sebagai implementasi dari kebijakan pokok perluasan dan pemerataan akses pendidikan. Program – program tersebut didukung oleh anggaran baik yang bersumber dari APBD dan APBN sebesar Rp. 1,205,298,953,454 pada tahun 2018, tahun 2019 sebesar Rp. 1,240,254,550,830 dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 1,257,305,198,489. Sedangkan realisasi keuangan dari tahun 2018 sebesar 95.27, tahun 2019 sebesar 96.04, dan tahun 2020 sebesar 98.32, realisasi fisik tahun 2018 mencapai 98.95 tahun 2019 mencapai 99.37, dan realisasi fisik tahun 2020 mencapai 99.84. Tahun Anggaran 2021, Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB sebesar Rp. 2,008,563,761,955,- Realisasi Keuangan mencapai Rp. 1,921,991,195,307,- atau sebesar 98.00 % sedangkan Realisasi Fisik mencapai 98.44 %. Tahun 2022 Anggaran Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp. 1.615.948.287.284,- sedangkan realisasi Keuangan mencapai Rp. 1.443.642.916.580.- dan realisasi fisiknya 89.34 %.

Indikator pengukuran kinerja bukan hanya realisasi anggaran seperti di atas, Laporan Akuntabilitas ini perlu disusun dengan berpedoman kepada beberapa regulasi. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini adalah:

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Permenpan 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019 – 2023;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 - 2023;
14. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Tahun 2019 - 2023;
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2022 nomor : DPA/A.1/1.01.2.22.0.00.02.0000/001/2022 Tanggal, 3 Januari 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2022 nomor : DPPA Nomor : B/.1/1.01.2.22.0.00.02.0000/001/2022 Tanggal 21 Oktober 2022.

Selain peraturan dan perundang – undangan di atas, secara menyeluruh LKJip Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 akan mencakup semua Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023.

1.2. Aspek Strategis Organisasi

Aspek - aspek strategis merupakan aspek-aspek yang menjadi potensi atau kekuatan organisasi sehingga diperoleh kejelasan tentang kekuatan – kekuatan di dalam organisasi. Sedangkan disatu sisi terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam bidang pendidikan yang tentunya nanti mempengaruhi pencapaian tujuan atau pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan walaupun dipengaruhi oleh berbagai permasalahan yang terjadi. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.

Untuk mempercepat implementasi dan konsistensi tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam proses pembangunan pendidikan, perlu dikembangkan strategi dan arah kebijakan sehingga dinamika pembangunan pendidikan tetap terarah, terpadu dan berkesinambungan. Strategi adalah pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau memperkuat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Mengarahkan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun dan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya, diperlukan pedoman berupa arah kebijakan. Untuk menentukan strategi dan arah kebijakan, dilakukan dengan menggunakan metoda analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dengan memperhatikan berbagai isu strategis yang berkembang.

Selanjutnya strategi yang telah ditentukan dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran yang diinginkan. Secara umum strategi dipetakan kedalam empat perspektif yaitu perspektif masyarakat/layanan, perspektif internal, perspektif kelembagaan dan perspektif keuangan.

- **Perspektif Masyarakat / Layanan:** bagaimana strategi dapat menjadikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Jenis

strategi antara lain sosialisasi, konsolidasi, konsultasi, negosiasi, mediasi, promosi, intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, mobilisasi.

- **Perspektif Proses Internal:** strategi harus mampu menjadikan perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi (*internal business process*). Jenis strategi antara lain koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, sinergi.
- **Perspektif Kelembagaan:** strategi harus mampu menjelaskan jenis investasi kepada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) dalam jangka panjang. Jenis strategi antara lain rasionalisasi, revitalisasi, restrukturisasi, reorganisasi, rekonstruksi, akreditasi, reposisi, ratifikasi, desentralisasi.
- **Perspektif Keuangan:** strategi harus dapat menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain (*cost-effectiveness*) serta untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (*allocative efficiency*).

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis pembangunan yang telah ditetapkan dan mencermati isu-isu strategis pembangunan Pendidikan NTB 5 tahun kedepan, maka Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan berdasarkan misi dan tujuan pembangunan 2019 - 2023 sebagaimana tabel berikut;

1.3. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Isu strategis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB terdiri dari beberapa bidang Pembinaan adalah sbb :

- A. Urusan Pendidikan :
 - ❖ Data peserta didik lulusan SMA yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi belum semuanya terhimpun terutama sekolah swasta
 - ❖ Nilai literasi dan numerasi SMA masih dibawah rata-rata nasional
 - ❖ Kondisi sarpras SMA tidak memadai (Melakukan rehabilitasi baik ringan/sedang /maupun berat
 - ❖ Kondisi sebaran ruang kelas tidak merata
 - ❖ Ketersediaan ruang lab dan perpustakaan masih terbtas terutama sekolah swasta

- ❖ Pada sekolah tertentu ketersediaan ruang kelas melebihi kebutuhan namun pada sekolah lain masih tercatat kurang
- ❖ Terbatasnya sarana penunjang seperti, Lab, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang OSIS, ruang BK dll
- ❖ Nilai literasi dan numerasi SMK masih dibawah rata-rata nasional
- ❖ Terbatasnya kompetensi lulusan SMK ditandai dengan terbatasnya kepemilikan sertifikat kompetensi
- ❖ Keterserapan lulusan SMK belum maksimal
- ❖ Ketersediaan Guru produktif sangat terbatas
- ❖ Nilai literasi dan numerasi SLB masih dibawah rata-rata nasional
- ❖ Terbatasnya guru lulusan PLB
- ❖ Ketersediaan Guru Pembimbing Khusus pada sekolah penyelenggara Inklusif sangat terbatas
- ❖ Kurangnya pengawas mata pelajaran SMA/SMK/SLB
- ❖ Kurangnya guru produktif untuk KK tertentu
- ❖ Kurangnya GPK (Guru Pendamping Khusus) pada sekolah penyelenggara Inklusif sangat terbatas
- ❖ Kurangnya jumlah tenaga administrasi yang ASN yang memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan
- ❖ Kurangnya Jumlah tenaga laboran, perpustakaan, dan teknis Kurangnya jumlah guru penggerak di SMK/SMA/SLB
- ❖ Banyaknya guru yang belum bisa sertifikasi karena tidak bisa PPG
- ❖ Adanya guru yang tidak memiliki sertifikat pendidik dan mengajukan naik pangkat melalui jalur umum
- ❖ Kurangnya pengawas mata pelajaran SMA/SMK/SLB
- ❖ Kurangnya Pemahaman guru terhadap Literasi dan Numerasi
- ❖ Kurangnya pemahaman guru tentang pembuatan soal tentang literasi dan numerasi
- ❖ Kurangnya pengawas guru produktif
- ❖ Kurangnya Pemahaman terhadap Profil Pelajar Pancasila Cerdas Berkarakter.

B. URUSAN KEBUDAYAAN

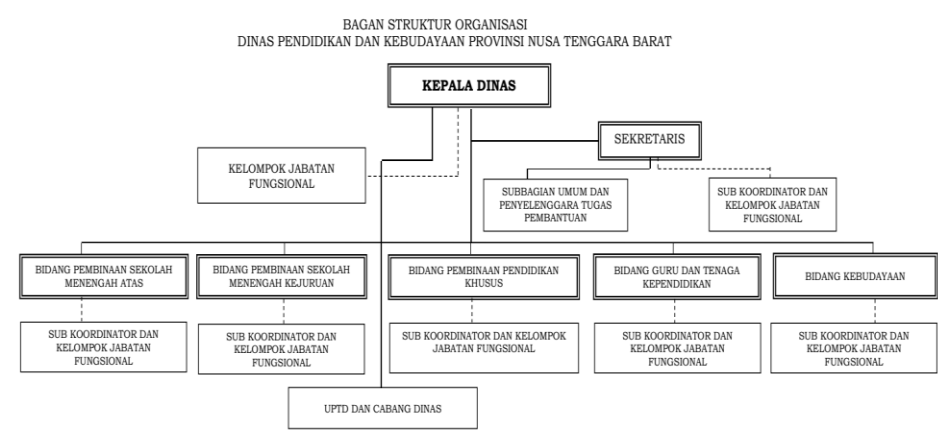
- ❖ Kurangnya pendokumentasian (tertulis Audio Visual) karya budaya dari OPK yang ada di NTB
- ❖ Belum ada Data Base Kebudayaan Prov. NTB yang terdiri dari : Tenaga kebudayaan, Aktivitas Budaya di masyarakat, Lembaga-lembaga Kebudayaan dimasyarakat
- ❖ Kurangnya pembinaan ke masyarakat tentang 5P OPK : Pengembangan, Pelestarian, Pemanfaatan, Perlindungan, Pembinaan
- ❖ Belum adanya standarisasi (pakem) dari OPK sehingga OPK tidak berkembang dan jika berkembangpun tidak sesuai dengan kearifan lokal
- ❖ Bidang Kebudayaan selalu digarda terdepan tetapi ada proses persiapan dan penganggaran selalu ditempatkan dibelakang kepentingan-kepentingan Pendidikan
- ❖ Kurangnya Informasi kesenian, Dokumentasi tertulis dan audio visual sangat langka sehingga masyarakat tidak memiliki acuan untuk mengembangkan kesenian tradisional dilingkungannya, hal ini menyebabkan jumlah kelompok-kelompok kesenian dimasyarakat makin berkurang.
- ❖ Kurang maksimalnya fungsi Pendidikan kesenian disekolah, pelajaran kesenian masih menekankan pada aspek Kognitif Kurang memperhatikan aspek efektif (apresiasi)
- ❖ Kurangnya tenaga Guru kesenian yang berkelayakan dan berkopetensi
- ❖ Kurangnya pembinaan Kesenian
- ❖ Kurangnya Jabatan Fungsional ditingkat Kecamatan
- ❖ Beragamnya Nomenclatur/Sistem kelembagaan ditingkat kabupaten/Kota yang menangani Kebudayaan
- ❖ Rendahnya apresiasi masyarakat
- ❖ Kurangnya penghargaan pemerintah terhadap pelaku seni Budaya

1.4. Struktur Organisasi

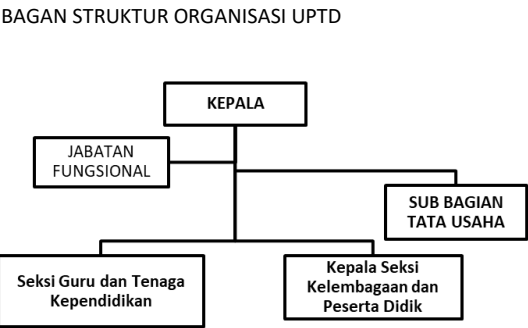
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki struktur organisasi yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur 53 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi NTB. Sedangkan untuk UPTD yang berada pada dinas Dikbud Provinsi NTB ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2022 Tentang PembentukanKedudukanSusunan OrganisasiTugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah Dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Cabang Dinas pada Dinas Dikbud ditetapkan Peraturan Gubernur 91 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Untuk satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus struktur organisasinya ditetapkan dalam Pergub 26 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Pergub 10 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB.

❖ Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2021



❖ Struktur Organisasi UPTD Lingkup Dinas Dikbud Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2022



❖ Gambar 2. Struktur Organisasi Cabang Dinas Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2022



1.5 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam Melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari: Kepala Dinas; Sekretariat, terdiri atas: Sub Bagian Umum dan Penyelenggara Tugas Pembantuan; Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Pendidikan Khusus, Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, Bidang Kebudayaan;

Sedangkan pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan s; terdiri atas: (1) Sub Bagian Tata Usaha; (2) Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan; (3) Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik; dan (4) Kelompok Jabatan Fungsional. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan, terdiri atas: (1) Sub Bagian Tata Usaha; (2) Seksi Pengembangan Media Pembelajaran; (3) Seksi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengelolaan Data Pendidikan; dan (4) Kelompok Jabatan Fungsional. Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Budaya, terdiri atas: (1) Sub Bagian Tata Usaha; (2) Seksi Pelestarian Seni Budaya; (3) Seksi Penyelenggaraan Seni Budaya; dan (4) Kelompok Jabatan Fungsional. Unit Pelaksana Teknis Dinas Museum Negeri Nusa Tenggara Barat, terdiri atas: (1) Sub Bagian Tata Usaha; (2) Seksi Pengkajian dan Perawatan; (3) Seksi Penyajian dan Layanan Edukasi; (4) Kelompok Jabatan Fungsional. Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan; terdiri atas (1) Sub Bagian Tata Usaha; (2) Kelompok Jabatan Fungsional; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat berkomitmen penuh dalam mewujudkan visi dan misi NTB Gemilang periode 2019-2023. Amanah yang diberikan melalui misi NTB Sehat & Cerdas serta NTB Aman & Berkah dijadikan pedoman dalam meningkatkan mutu pendidikan di Nusa Tenggara Barat. Tujuan adalah pernyataan - pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

2.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan jangka menengah pembangunan pendidikan dan kebudayaan adalah terwujudnya jangkauan layanan pendidikan yang berkualitas dan terwujudnya jangkauan pembangunan kebudayaan yang berkualitas. Sedangkan sasaran pembangunan pendidikan dan kebudayaan tahun 2019-2023 adalah meningkatnya aksesibilitas layanan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, meningkatnya capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP), meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan manajemen, serta meningkatnya jangkauan dan kualitas layanan kebudayaan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang dirumuskan tersebut serta target indikator tujuan/ sasaran tahunan yang akan dicapai, maka disusun keterkaitannya seperti disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya jangkauan layanan pendidikan yang berkualitas	Meningkatnya aksesibilitas layanan pendidikan menengah dan pendidikan khusus	APK SMA/MA/SMK/ Paket C	Persen	98,13	98,63	99,15	99,95	100
			APM SMA/MA/SMK/ Paket C	Persen	90,5	92,42	93,4	93,40	95,28
			APS SMA/MA/SMK/ Paket C	Persen	94.57	95.79	96,68	97,57	98,02
			APK SLB	Persen	68,44	69	69,4	70	70,6
		Meningkatnya Mutu Pendidikan	Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B	Persen	69,21	71,30	73,44	75,58	76,25
			Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B	Persen	24	28	32	36	40
			Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke	Persen	-	-	60	65	67

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.	Meningkatnya Capaian Standar Nasional Pendidikan		Perguruan Tinggi (PT)						
			Persentase Lulusan SMK yang terserap	Persen	-	-	10	35	37
3	Terwujudnya Pemajuan Pembangunan Kebudayaan		Indeks Pembangunan Kebudayaan	Persen	-	-	-	45,11	51,56
		Meningkatnya Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	Persentase Pengembangan OPK	Persen	-	-	-	50	55

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA MERUPAKAN UKURAN KEBERHASILAN DARI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NTB. PENETAPAN INDIKATOR DILAKUKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEGIATAN-KEGIATAN YANG MENDUKUNG TUJUAN STRATEGIS. INDIKATOR INI DIGUNAKAN UNTUK MENGUKUR KEBERHASILAN STRATEGIS, SEDANGKAN KEBERHASILAN KEGIATAN DI UKUR DENGAN MENGGUNAKAN INDIKATOR KELUARAN.

Tabel 2.

Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan
1	Terwujudnya jangkauan layanan pendidikan yang berkualitas	APK SMA/MA/SMK/Paket C	Formulasi Penghitungan $\frac{\sum \text{Peserta didik Jenjang SMA/MA/SMK/Paket C}}{\text{Jumlah Penduduk usia 16 - 18 tahun}}$ Tipe penghitungan : Kumulatif Sumber : Dikbud Prov. NTB
		APM SMA/MA/SMK/Paket C	Formulasi Penghitungan $\frac{\sum \text{PD Usia 16-18 thn Jenjang SMA/MA/SMK/Paket C}}{\text{Jumlah Penduduk usia 16 - 18 tahun}}$ Tipe penghitungan : Kumulatif Sumber : Dikbud Prov. NTB
		APS SMA/MA/SMK/Paket C	Formulasi Penghitungan $\frac{\sum \text{Peserta didik Usia 16-18 tahun yg masih sekolah}}{\text{Jumlah Penduduk usia 16 - 18 tahun}}$ Tipe penghitungan : Kumulatif Sumber : Dikbud Prov. NTB

Formatted Table

		APK SLB	Formulasi Penghitungan $\frac{\sum \text{Peserta didik SLB}}{\text{Penduduk berkebutuhan khusus usia 7 -18 tahun}} \times 100$ Tipe penghitungan : Kumulatif Sumber : Dikbud Prov. NTB
2	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B	Formulasi Penghitungan $\frac{\sum \text{SMA + SMK terakreditasi A + B}}{\text{Seluruh SMA + SMK yang sudah terakreditasi}} \times 100$ Tipe penghitungan : Kumulatif Sumber data : Badan Akreditasi Nasional BAN-SM
		Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B	Formulasi Penghitungan $\frac{\sum \text{SLB terakreditasi A + B}}{\text{Seluruh SLB yang sudah terakreditasi}} \times 100$ Tipe penghitungan : Kumulatif Sumber data : Badan Akreditasi Nasional BAN-SM
		Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT)	Formulasi Penghitungan $\frac{\sum \text{Lulusan SMA ke jenjang Perguruan Tinggi thn n}}{\text{Lulusan SMA di tahun n}} \times 100$ Tipe penghitungan : Kumulatif Sumber data : Dikbud Prov. NTB
		Persentase Lulusan SMK yang terserap	Formulasi Penghitungan $\frac{\sum \text{Lulusan SMK yg terserap di tahun n}}{\text{Lulusan SMK di tahun n}} \times 100$ Tipe penghitungan : Kumulatif Sumber data : Dikbud Prov. NTB
3	Meningkatnya Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	Persentase OPK yang dikembangkan	Formulasi Penghitungan $\frac{\sum \text{OPK yang dilestarikan}}{\text{OPK yang ada}} \times 100$ Tipe penghitungan : Kumulatif Sumber data : Dikbud Prov. NTB

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan Perjanjian kinerja antara lain :

- a) Meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
- b) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur

- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
- d) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitroing, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan /kemajuan kinerja pemberi amanah.
- e) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Secara khusus tujuan Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dengan demikian Perjanjian Kinerja berfungsi sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, juga sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi kinerja aparatur sekaligus sebagai dasar pemberian *reward* (penghargaan) dan *Punishment* (sanksi).

Ruang lingkup Perjanjian Kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan *issue strategic* yang sedang dihadapi organisasi.

Perjanjian Kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pendidikan No. 19 A Mataram Tlp. Fax (0370) 632593
[Http://dikbud.ntbprov.go.id](http://dikbud.ntbprov.go.id) email : dikbud@ntbprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E, M.Sc
Jabatan : Gubernur Nusa Tenggara Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram,, 2022

PIHAK KEDUA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PIHAK KESATU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Dr. H. ZULKIEFLIMANSYAH, SE, M.Sc

Dr. H. AIDY FURQAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19710124 199801 1 002

Gambar 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022				
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NTB				
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran		Target 2022
1	2	3		4
1	Meningkatnya Aksesibilitas layanan pendidikan menengah dan Pendidikan Khusus	1	APK SMA, MA, SMK, Paket C	99.95 %
		2	APM SMA, MA, SMK, Paket C	94.38 %
		3	APS SMA, MA, SMK, Paket C	97.57%
		4	APK SLB	70 %
2	Meningkatnya Mutu Pendidikan	5	Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Menengah Minimal B	75,58%
		6	Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B	36 %
		7	Persentase Lulusan SMA yang Melanjutkan	65 %
		8	Persentase Lulusan SMK yang terserap	35 %

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran		Target 2022
1	2	3		4
3	Meningkatnya Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	9	Persentase Pengembangan OPK	60 %

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp.532.865.362.870,-	Sumber Dana : APBD Mendukung Sasaran Strategis No. 1 dan 2 PK Indikator Kinerja PK no. 1 s.d 9, IKU Provinsi No.12 dan 13, dan IKD No. 14, 15 dan 16
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Rp.116.294.000.-0	Sumber Dana : APBD mendukung Sasaran Strategis No. 2 PK Indikator kinerja PK No.8, 9 dan 11, IKU Provinsi No. 12 dan 13 dan IKD No. 14, 16 dan 16
3.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp. 70.355.384.280.-	Sumber Dana : APBD Mendukung sasaran strategis No. 2 PK Indikator Kinerja PK No. 7 dan 8 , IKU Provinsi No. 12 dan 13 dan IKD NO. 14, 15 dan 16
4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Rp. 48.631.600,-	Sumber Dana : APBD Mendukung Sasaran Strategis No. 2 PK Indikator Kinerja PK No. 8, 9 dan 11, IKU Provinsi No. 12 dan 13, dan IKD No. 14, 15 dan 16
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Rp. 1.014.084.785.655.-	Sumber Dana : APBD Mendukung Sasaran Strategis No. 3 PK Indikator Kinerja PK No. 12 dan 13 IKU Provinsi No. 12 dan 13 dan IKD NO. 14, 15 dan 16
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Rp. 590.000.000.-	Sumber Dana : APBD Mendukung Sasaran Strategis No. 3 PK Indikator Kinerja no.8 RPJMD Bab VIII IKD No. 64
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Rp. 107.435.800.-	Sumber dana : APBD mendukung Sasaran Strategis No. 3 PK Indikator Kinerja No.8 RPJMD Bab VIII IKD No. 64
8	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Rp. 105.697.700.-	Sumber Dana : APBD mendukung Sasaran Strategis No. 3 PK Indikator Kinerja No 8 RPJMD Bab VIII IKD No. 64

9

PROGRAM PELESTARIAN
DAN PENGELOLAAN CAGAR
BUDAYA

Rp. 149.999.800.-

Sumber Dana : APBD

mendukung Sasaran Strategis No. 3
PK Indikator Kinerja No 8 RPJMD Bab
VIII IKD No. 64

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Dr. H. ZULKIEFLIMANSYAH, SE, M.Sc

Dr. H. AIDY FURQAN, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19710124 199801 1 002

Gambar 3 Penilaian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTB

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai Oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan pada tahun 2022 dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Dikbud Prov. NTB dengan Gubernur NTB, yang mencakup Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target yang hendak dicapai, program/kegiatan yang hendak dilaksanakan serta jumlah anggaran yang tersedia.

3.1 Capaian Kinerja Dikbud NTB Tahun 2022

Sebagaimana struktur Permendagri No. 90 Tahun 2019, berikut ini dipaparkan capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB tahun 2022

Tabel 3. Target Dan Realisasi Capaian Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2022

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya Aksesibilitas Peningkatan Layanan pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	%	99.95	107.34	107.39
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	94.38	97.28	103.07
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	%	97.57	98.18	100.63
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	70	89.33	127.61
2	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Menengah Minimal B	%	75.58	67.58	89.415
		Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B	%	36	42	116.67
		Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan	%	65	66.02	101.57
		Persentase lulusan SMK yang terserap	%	35	35.31	100.89
3	Meningkatnya Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	Persentase Pengembangan OPK	%	60	83,33	138.88

3.2. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019 s.d 2022

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		2019			2020			2021			2022		
				TARGE T	REALISASI	%	TARG ET	REALISASI	%	TARGE T	REALISASI	%	TARG ET	REALI SASI	%
1	Meningkatnya Aksesibilitas Peningkatan Layanan pendidikan	1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Pake t C	98.13	98.55	100.43	98.63	102.21	103.63	99.15	106.41	107.32	99.95	107.34	107.39
		2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Pake t C	90.05	88.42	98.19	92.42	92.57	100.16	93.40	96.65	103.48	94.38	97.28	103.07
		3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Pake t C	94.57	94.46	99.88	95.79	95.79	100.00	96.68	98.08	101.45	97.57	98.18	100.63
		4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	68.44	68.60	100.23	69.00	81.71	118.42	69.40	84.19	121.31	70	89.33	127.67
2	Meningkatnya Mutu Pendidikan	5	Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Menengah Min. B							73.44	69.40	94.5	75.58	67.58	89,41
		6	Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B							32	42	131.25	36	42	116.66
		7	Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan							60	24	40	65	66.02	101.56
		8	Persentase Lulusan SMK yang terserap							10	35	350	35	35.31	100.88
3	Meningkatnya Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	7	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan										50	83,33	138,88

3.3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Kinerja dan Solusi

Penilaian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah tolak ukur keberhasilan Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang meliputi semua masyarakat pada umur sekolah yang berada pada dunia kependidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi yang menangani SLB/SMA/SMK, Kemenag yang menangani MA/ sederajat, serta Dinas Pendidikan di Kabupaten yang menangani Paket C.

Pada capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMA/Paket C di tahun 2022 telah melampaui target dari yang direncanakan yaitu dari 99,95 % menjadi 107,39 % yang dapat diartikan bahwa pada tahun 2022 banyak anak usia pendidikan menengah yang bersekolah dari pada anak yang tidak bersekolah. Beberapa faktor yang menyebabkan terlampauinya target pada tahun 2022 ini diantaranya adalah : dilihat dari data bahwa ada anak yang masih berada di bawah ketentuan masuk sekolah sudah ada di pendidikan salah satunya adalah anak yang berumur 5 s/d 6 tahun sudah masuk SD sehingga pada

saat masuk SMA/ sederajat umurnya dibawah 16 tahun. Faktor yang kedua adalah adanya anak yang tinggal kelas, faktor yang ketiga adalah adanya penduduk dari provinsi lain yang bersekolah di daerah Provinsi NTB dikarenakan salah satu adalah kepindahan orang tua.

Pada capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2022 melebihi dari target yaitu 94,38 % menjadi 103,07 % dapat diartikan bahwa usia anak usia 16 s.d 18 meningkat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari APM adalah :

1. Aksesibilitas mudah karena sudah keluar dari pandemi covid 19
2. Kesadaran masyarakat yang sudah tinggi akan kebutuhan pendidikan
3. Keadaan ekonomi yang mulai pulih dengan slogan pulih lebih cepat bangkit lebih kuat

Pada capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2022 meningkat dari 97,57 % menjadi 100,63 % dapat diartikan bahwa ada anak-anak usia sekolah yang melebihi usia sekolah yaitu melebihi usia 18 tahun dikarenakan ada anak yang tinggal kelas dan ada anak-anak yang telat masuk sekolah pada awalnya sehingga melebihi usia yang seharusnya selesai pada taraf pendidikan tersebut.

Pada Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022 dari target 70 % menjadi 89.33 % dapat diartikan bahwa peserta didik pada usia sekolah pendidikan khusus telah melampaui jumlah penduduk yang berkebutuhan khusus pada usia tersebut.

Pada capaian Nilai Akreditasi Pendidikan Menengah dikarenakan perubahan sistem penilaian akreditasi dari Penilaian perkompetensi keahlian menjadi persatuan pendidikan dan berubahnya beberapa kompetensi keahlian pada beberapa SMK atau dikenal dengan Refokusing core bisnis dan refokusing kompetensi keahlian, sehingga dikarenakan berubah jurusan sehingga akreditasinya mengulang kembali.

Pada capaian prosentase lulusan SMA yang melanjutkan telah mencapai target dari 65 % menjadi 66,02 %. Pada penelusuran lulusan SMA lewat link Tracer study yang dilakukan pertama kali pada tahun 2022 ini merupakan penelusuran by name dan by address dimana tiap sekolah mengisikan sesuai dengan nama siswanya dan melanjutkan ke Perguruan Tinggi mana mereka melanjutkan studynya dan bekerja di mana . Masih banyak dari sekolah-sekolah yang belum mengisi penelusuran alumni tersebut kemungkinan karena penelusuran ini dilakukan pada bulan Desember sehingga sekolah-sekolah sudah kehilangan kontak dengan alumninya, sehingga diperlukannya pendataan yang baik sebelum lulusan mengambil ijazahnya.

Pada capaian penelusuran Lulusan SMK yang terserap terdapat tiga (3) kriteria yakni:

1. Bekerja di dunia kerja
2. Melanjutkan ke Perguruan Tinggi
3. Berwirausaha

Lewat link tracer study yang telah dilakukan terdapat kenaikan dari target yang diharapkan dari 35 % menjadi 35, 31 % . Pada penelusuran ini juga by name by address bagi semua sekolah SMK se NTB dimana masih terdapatnya sekolah-sekolah yang masih belum mengisi link tersebut terutama sekolah-sekolah swasta, sehingga perlunya koordinasi yang baik dengan pihak pengelola sekolah-sekolah swasta serta perlunya pendataan yang baik sebelum lulusan mengambil ijazahnya.

Pada Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK) adanya gerakan Sabtu budaya di sekolah se NTB, telah diterbitkannya Perda Nomor 16 tahun 2021 tentang Pemajuan Kebudayaan. Pada target 50 % menjadi 83,33 % dari 12 OPK telah dikembangkan 10 OPK .

Koordinasi dan kerjasama antara semua komponen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sangat intensive dilakukan. Penyerapan anggaran, pelaksanaan kegiatan, volume dan frekuensi kegiatan yang sangat tinggi menuntut kecepatan dan ketepatan dalam bertugas sehingga apabila terdapat kendala segera teridentifikasi dan teratasi. Selain koordinasi internal, koordinasi antara atau dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya tetap dilakukan dengan intensive. Terutama dalam kegiatan perencanaan, pencairan anggaran, pelaporan, penyediaan atau penggunaan barang dan jasa. Peran teknologi komunikasi, peran aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Keuangan dan Anggaran dan model – model interaksi online jarak jauh sangat membantu pelaksanaan tugas.

Faktor pendukung lainnya, disatu sisi keterbatasan anggaran daerah akan tetapi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB terdapat sumber anggaran lain yang berasal dari transfer pemerintah pusat. Seperti 1) Dana Alokasi Khusus untuk pembangunan, rehab, dan sarana prasarana sekolah, 2) DAK Non Fisik untuk Museum, Taman Budaya, dan BOS Sekolah. Faktor penghambat secara singkat dapat digambarkan bahwa kegiatan tidak dapat dieksekusi yaitu karena revisi anggaran berkali – kali sehingga menyebabkan durasi waktu yang tersedia sangat pendek, karena kesalahan pada Pendataan lewat Operator Dapodikmen, operator Emis serta Operator Dapodikdasmen Kabupaten, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Kekurangan Sumber Daya Yang Kompeten, ketersediaan anggaran Daerah dan lainnya ..

Sedangkan pada tahun 2022, beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana matrik berikut ini.

TABEL 6. PERMASALAHAN DALAM PENCAPAIN KINERJA DIKBUD NTB TAHUN 2022

Urusan Program / Kegiatan /Sub kegiatan / Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3
PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA/MA/SMK/Paket C	Kurangnya koordinasi dengan Kemenag dan Kabupaten
	APM SMA/MA/SMK/ Paket C	Kurangnya koordinasi dengan Kemenag dan Kabupaten
	APS SMA/MA/SMK/ Paket C	Kurangnya koordinasi dengan Kemenag dan Kabupaten
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	Masih belum baiknya koordinasi dengan Kemenag dan Kabupaten
	Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Keterbatasan Anggaran, Sebaran Penduduk, Jumlah Ruang Kelas yang masih Belum tergambar kondisi fisik Ruang Kelas uang ada di DAPODIK
	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah	Perlunya analisis kebutuhan guru yang tepat sampai ke jurusannya/bidang study
	Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB,	Perlunya analisis kebutuhan guru sampai ke bidang study
Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Akreditasi SMA Minimal B	Masih kurangnya perhatian terhadap akreditasi sekolah
	Angka melanjutkan SMA ke Perguruan Tinggi	Belum semua Sekolah Negeri dan sekolah swasta mengirimkan data siswa melanjutkan melalui Link yang telah disebarakan ke sekolah se-NTB, dikarenakan kurangnya sosialisasi dan penekanan dari bidang
	Penurunan Angka DO SMA	Perlunya updating di Dapodik

Urusan Program / Kegiatan /Sub kegiatan / Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3
	Persentase SMA yang direvitalisasi	Target tidak dapat dicapai karena untuk tahun 2022 dikonsentrasikan kepada penyediaan fasilitas secara maksimal pada masing-masing sekolah (konsep ketuntasan) bukan hanya ketersebaran semata
	Persentase Data Sarpras SMA yang tersedia	Masih perlunya updating data dapodik
	Persentase peserta didik yang menerima Layanan SPM bidang Pendidikan	Dinas sudah menyiapkan data base peserta didik penerima SPM dan menyiapkan dokumen pelelangan dan telah mengusulkan pengajuan dana ke BPKAD namun dana yang tersedia hanya 50% dan saat akan dieksekusi waktu terbatas karena harus dilakukan tender
	Persentase Pelaporan penggunaan dana BOS	Tidak ada kewajiban bagi sekolah untuk melaporkan penggunaan dana BOSnya ke Dinas karena saat ini pencairan Dana BOS langsung dari pusat dan pelaporan langsung dikirim ke pusat
	Persentase peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS SMA	Perlunya sosialisasi pengelolaan BOS secara masif
	Persentase pembinaan prestasi siswa	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis
	Persentase Data Peserta Didik SMA yang tersedia	Diperlukannya diklat untuk operator Dapodik
	Persentase Akreditasi SMA minimal B	Berdasarkan Lap. Hasil akreditasi BAN SM
	Persentase Usulan pengajuan Izin Operasional yang disetujui	Target tidak mencapai 100% karena adanya regulasi baru terkait perizinan sekolah dimana dinas tidak diperbolehkan lagi menerbitkan izin sekolah dan penerbitan izin harus melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Persentase SMA yang menerapkan SKS	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis
	Persentase sekolah yang telah menyusun modul dan bahan ajar bahasa daerah	Kegiatan ini tidak mencapai target yang ditetapkan karena dana yang dialokasikan mengalami pengurangan (refocusing) sehingga target peserta yang akan diundang berubah atau mengalami penurunan

Urusan Program / Kegiatan /Sub kegiatan / Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3
	Persentase Dokumen Kurikulum yang disyahkan	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis
KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN SMK	Persentase akreditasi SMK Minimal B	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis
	Penurunan DO SMK	
	Persentase angka terserap Ke Dudi	Belum semua sekolah mengisi Tracer study yang telah dikirimkan lewat Link karena masih kurangnya sosialisasi dan penekanan dari bidang
	Persentase SMK yang direvitalisasi sarprasnya	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis
	Jumlah peserta didik SMK yang menerima SPM Pendidikan (Alat tulis)	Dinas sudah menyiapkan data base peserta didik penerima SPM dan menyiapkan dokumen pelelangan dan mengusulkan dana ke BPKAD tapi dana yang tersedia 50% dan saat akan dieksekusi waktu terbatas karena harus dilakukan tender
	Jumlah Siswa Penerima BOS	
	Persentase SMK Negeri sebagai BLUD	Usulan telah disampaikan kepada Tim Penilai yang terdiri dari Sekda, Karo Ekonomi, Karo Hukum, inspektorat, Bappeda dan BPKAD namun hingga saat ini hasil penilaian belum keluar
	Persentase Data Sarpras yang tersedia	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis
	Jumlah Perlengkapan Sekolah (buku dan alat tulis) Siswa SMK	Data penerima terlambat diterima, dan anggaran yang tersedia hanya setengah sehingga tidak dieksekusi
PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS	Persentase APK SLB	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis
	Persentase Sekolah yang menerapkan Layanan Inklusi	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis
	Persentase Akreditasi SLB Minimal B	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis
	Persentase SLB yang direvitalisasi sarprasnya	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis
	Jumlah Perlengkapan Sekolah (buku dan alat tulis) Siswa SMK	Data terlambat diterima, anggaran yang tersedia hanya setengahnya
	Jumlah siswa penerima BOS	

Urusan Program / Kegiatan /Sub kegiatan / Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		
Penetapan Kurikulum Muatan lokal Pendidikan Menengah	Persentase sekolah yang telah menyusun modul dan bahan ajar bahasa daerah	Kegiatan ini tidak mencapai target yang ditetapkan karena dana yang dialokasikan mengalami pengurangan (refocusing) sehingga target peserta yang akan diundang berubah atau mengalami penurunan
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Persentase Kurikulum disyahkan	Anggaran direfocusing
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Kepala Sekolah SMA yang bersertifikat Calon Kepala Sekolah (Cakep)	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis
	Persentase Kepala Sekolah SMK yang bersertifikat Calon Kepala Sekolah (Cakep)	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis
	Persentase Pengawas SMA bersertifikat Calon Pengawas (Cawas)	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis
	Persentase Guru SMA yang berijazah minimal SI/ DIV	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis
	Persentase Pendidik SMK minimal DIV/SI dan bersertifikat pendidik	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis
	Persentase Guru SLB yang berijazah minimal SI/ DIV	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis
	Persentase Kepala Sekolah SMK yang bersertifikat Calon Kepala Sekolah (Cakep)	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Rasio guru terhadap peserta didik SMA	1 : 13
	Rasio Guru Terhadap Peserta Didik SMK	1: 11
	Rasio Guru Terhadap Peserta Didik SLB	1: 5
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah peserta Bimtek Calon Kepala Sekolah SMA, SMK dan SLB	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis

Urusan Program / Kegiatan /Sub kegiatan / Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3
	Jumlah peserta Peningkatan Komptensi PTK dan Tenaga Kebudayaan Jenjang SMA, SMK, dan SLB	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis
	Standarisasi Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi PTK dan Tenaga Kebudayaan	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Swasta yang terpantau perizinannya	Anggaran Direfocusing
Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Izin yang diterbitkan	Anggaran Direfocusing
Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Izin yang diterbitkan	Anggaran Direfocusing
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Pengembangan Bahasa dan sastra	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Persentase pembinaan, pengembangan dan perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis
Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi	Persentase Naskah Buku Bacaan, Modul dan Bahan Ajar Bahasa dan Sastra Daerah yang tersusun	Akibat Refokusing anggaran berdampak pada perolehan Juara yang seharusnya 6 orang menjadi 4 orang sehingga penghargaan pemerintah pada masyarakat tidak memenuhi target.
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten / Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Cakupan Pengelolaan Kebudayaan	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis

Urusan Program / Kegiatan /Sub kegiatan / Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan di Sekolah Negeri	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis
	Persentase sekolah yang diinisiasi untuk membentuk Komunitas Sejarah di Satuan Pendidikan	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cakupan pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Persentase Cagar Budaya yang dikelola	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis

3.4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi anggaran pada tahun 2022 sangat sering dilakukan, pelaksanaan efisiensi tetap mengacu kepada ketentuan atau anjuran OPD terkait dan lembar kerja. Anggaran kegiatan yang paling sering terkena rasionalisasi atau pemangkasan seperti kegiatan – kegiatan Pelatihan yang harus mengumpulkan banyak orang, perjalanan Dinas yang tidak mungkin dilaksanakan. Walaupun demikian, koordinasi harus berjalan dan merubah pola; mengurangi volume, bahkan menghapus kegiatan, atau diganti dan dilaksanakan melalui media teknologi informasi. Sebagai dampak efisiensi tersebut realisasi anggaran tidak mungkin mencapai 100%. Adapun gambaran Efisiensi anggaran dapat dibaca pada tabel 11.

3.5. Program / Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Tabel 7. Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROYEK UTAMA
1	Meningkatnya Aksesibilitas Peningkatan Layanan pendidikan	1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	Pendataan lewat Dapodikmen	Updating Data Dapodik/emis/dapodikdasmen	Pemberdayaan Managemen Data	Koordinasi lintas sektoral antara Dikbud, Kemenag dan Kabupaten/Kota
		2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	Pendataan lewat Dapodikmen	Updating Data Dapodik/emis/dapodikdasmen	Pemberdayaan Managemen Data	Koordinasi lintas sektoral antara Dikbud, Kemenag dan Kabupaten/Kota
		3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	Pendataan lewat Dapodikmen	Updating Data Dapodik/emis/dapodikdasmen	Pemberdayaan Managemen Data	Koordinasi lintas sektoral antara Dikbud, Kemenag dan Kabupaten/Kota
		4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	Pendataan lewat Dapodikmen	Updating Data Dapodik/emis/dapodikdasmen	Pemberdayaan Managemen Data	Koordinasi lintas sektoral antara Dikbud, Kemenag dan Kabupaten/Kota
2		5	Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Menengah Min. B	Pendataan lewat Dapodikmen	Updating Data Dapodik	Pemberdayaan Managemen Data Dapodik	Sosialisasi dan Pelatihan Operator Dapodik

	Meningkatnya mutu Pendidikan	6	Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B	Pendataan lewat Dapodikmen	Updating Data Dapodik	Pemberdayaan Managemen Data Dapodik	Sosialisasi dan Pelatihan Operator Dapodik
		7	Persentase lulusan SMA yang melanjutkan	Tracer Study SMA	Pembuatan Link Pendataan	Penyampaian Link Pendataan Ke sekolah	Penyampaian prosentase hasil rekapan tiap sekolah by name by adress
		8	Persentase Lulusan SMK yang terserap	Tracer Study SMK	Pembuatan Link Pendataan	Penyampaian Link Pendataan Ke sekolah	Penyampaian prosentase hasil rekapan tiap sekolah by name by adress
3	Meningkatnya Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	9	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan Pengelolaan Kebudayaan	Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya	Pendataan, penataan OPK serta perlunya sosialisasi dan pembinaan masyarakat

Sebagaimana dijelaskan di atas, terdapat program atau kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan anggaran seperti; Ketersediaan Dana Alokasi Khusus untuk menunjang pencapaian tujuan untuk *meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan Pendidikan*. Secara khusus sangat menunjang ketersediaan ruang kelas, dan sarana prasarana belajar bagi siswa sekolah. Demikian juga dengan dana bantuan Biaya Operasional Sekolah yang sangat mendukung operasional sekolah. Disamping itu, komitmen kepala pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran dan program unggulan di bidang pendidikan sangat membantu pencapaian indikator kinerja seperti halnya dengan revitalisasi SMK. Dimana program ini secara utuh menjadi satu dengan Program Pengelolaan Pendidikan Bidang SMK.

Secara umum penyebab kegagalan pencapaian kinerja karena keterbatasan anggaran selain itu sering terkendala karena kurangnya management terhadap data. Oleh karena itu updating data yang ada di Dapodik tiap sekolah harus diberdayakan secara maksimal oleh pihak sekolah dan seharusnya, pengelolaan data bidang pendidikan menjadi isu penting sehingga pencapaian kinerja dapat terukur secara empirik yang bukan berdasarkan kepada laporan realisasi fisik dan keuangan saja. Selain itu, masih banyak kendala atau pengganggu seperti sering terjadi refocusing anggaran yang secara nyata dan langsung mengganggu ketercapaian indikator

r.

3.6. Realisasi Anggaran

Anggaran APBD Dinas Dikbud Provinsi NTB tahun 2022 sebesar Rp. 1.615.948.287.284,-. Tersebar ke Sekretariat, 5 Bidang , 8 Kantor Cabang Dinas, dan 3 UPTD.

	Anggaran	Realisasi	Serapan
SEKRETARIAT	986.060.143.316	867.134.210.028	87,94%
BIDANG SMA	270.571.588.842	237.787.243.035	87,88%
BIDANG SMK	240.038.268.146	223.884.881.354	93,27%
BIDANG PK	22.745.882.600	20.792.503.460	91,41%
BIDANG GTK	85.360.469.880	83.239.577.668	97,52%
BTIDP	359.999.800	262.074.290	72,80%
KCD MALOMBA	443.445.375	425.096.576	95,86%

KCD Lombok Tengah	515.114.000	514.224.966	99,83%
KCD Lombok Timur	570.235.200	544.192.809	95,43%
KCD Lombok Utara	368.287.960	349.138.406	94,80%
KCD Kab. Sumbawa Barat	392.690.000	378.803.687	96,46%
KCD Sumbawa	467.267.540	461.675.040	98,80%
KCD Dompu	433.118.000	424.337.698	97,97%
KCD Bima & Kota Bima	699.557.800	678.900.866	97,05%
BIDANG KEBUDAYAAN	1.098.733.300	1.026.001.093	93,38%
UPTD TAMAN BUDAYA	2.980.418.300	2.938.504.531	98,59%
UPTD MUSEUM	2.843.067.225	2.801.551.073	98,54%
JUMLAH	1.615.948.287.284	1.443.642.916.580	89,34%

TABEL 8. DISTRIBUSI ANGGARAN APBD DINAS DIKBUD PROVINSI NTB TAHUN 2022

Dari jumlah Anggaran Belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB Tahun 2022 diatas, Sekretariat mengelola sebesar 61,021%, Bidang SMA sebesar 16,744 %, Bidang SMK sebesar 14,854 %, Bidang PKPLK sebesar 1,408 %, Bidang Ketenagaan sebesar 5,282 % dan Bidang Kebudayaan sebesar 0,068 %, KCD Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat sebesar 0,027% , KCD Kabupaten Lombok Tengah sebesar 0,032% , KCD Kabupaten Lombok Timur sebesar 0,035%, KCD Kabupaten Lombok Utara sebesar 0,023%, KCD Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 0,024%, KCD Kabupaten Sumbawa 0,029% , KCD Kabupaten Dompu 0,027%, KCD Kota Bima dan Kabupaten Bima sebesar 0,043%, BTIDP sebesar 0,022%, UPTD Taman Budaya sebesar 0,184% dan Museum sebesar 0,176%.

Total PAGU belanja pada APBD yang dikelola langsung oleh Dinas Dikbud Provinsi NTB tahun 2022, sebesar Rp. 1.615.948.287.284,- Realisasi pengeluaran sampai bulan Desember 2022 berjumlah Rp. 1.443.642.916.580,- sehingga daya serapan anggaran adalah 89.34% dan daya seraf Fisik 99,71 %.

Rp. 1.443.642.916.580,-

X 100% = 89,34 %

Rp. 1.615.948.287.284,-

3.7. Realisasi Anggaran Dinas Dikbud tahun 2022 per bidang dan UPTD

Tahun 2022 Bagian Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalokasikan dana APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebesar Rp.364.544.935.756,- realisasi keuangan Rp.360.113.676.634; (98,78 %) dan daya serap Fisik 99.72 % ini berarti ada efisiensi penggunaan dana sebesar 1,22 % sebesar Rp. 4.431.259.122; melalui 8 kegiatan yaitu untuk mendukung Sasaran Strategis No. 1, indikator kinerja No. 1 dan BAB VIII RPJMD Indikator Nomor : 15 dan 16.

TABEL 9. REALISASI ANGGARAN DIKBUD NTB PER BIDANG DAN PER SUBBAGIAN

NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	Realisasi		
		KEUANGAN		FISIK %
		(Rp)	%	
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				

NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	Realisasi		
		KEUANGAN		FISIK %
		(Rp)	%	
1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.350.000	36.335.000	99,96	
1.01.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	37.505.000	37.445.000	99,84	
1.01.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	46.560.000	46.500.000	99,87	
1.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	41.745.000	41.725.000	99,95	
1.01.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	42.785.000	42.725.000	99,86	
1.01.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.975.000	21.855.000	99,45	
1.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	193.849.800	193.834.800	99,99	
1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	976.888.245.556	858.481.653.324	87,88	
1.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.995.382.500	1.991.240.300	99,79	
1.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.800.600	16.688.600	99,33	
1.01.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.073.000	13.073.000	100,00	
1.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	17.751.300	17.537.800	98,80	
1.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.846.600	20.682.300	99,21	
1.01.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8.567.400	8.515.400	99,39	
1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
1.01.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7.648.500	7.596.500	99,32	

NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	Realisasi		
		KEUANGAN		FISIK %
		(Rp)	%	
1.01.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	78.094.100	77.789.451	99,61	
1.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	169.263.000	169.046.479	99,87	
1.01.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				
1.01.01.1.04.05 Pengolahan Data Retribusi Daerah	4.762.200	4.762.200	100,00	
1.01.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	8.989.000	8.989.000	100,00	
1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
1.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	149.969.300	148.687.700	99,15	
1.01.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	61.457.500	59.377.500	96,62	
1.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8.551.200	8.551.200	100,00	
1.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5.800.000	5.800.000	100,00	
1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.685.000	20.685.000	100,00	
1.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.300.000	20.298.570	99,99	
1.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	670.482.000	670.347.000	99,98	
1.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.695.000	29.238.000	98,46	
1.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	186.945.000	164.880.000	88,20	
1.01.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	50.300.000	42.792.500	85,07	
1.01.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	56.700.000	56.700.000	100,00	
1.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	517.155.200	483.819.840	93,55	

NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	Realisasi		
		KEUANGAN		FISIK %
		(Rp)	%	
1.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0			
1.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	34.445.000	26.920.000	78,15	
1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	185.550.000	185.354.690	99,89	
1.01.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud	135.000.000	134.004.750	99,26	
1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.978.000	11.752.135	47,05	
1.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	525.080.000	507.419.918	96,64	
1.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	113.250.000	112.184.000	99,06	
1.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.839.511.160	2.476.253.480	87,21	
1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	394.370.000	354.474.917	89,88	
1.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	98.575.200	95.910.200	97,30	
1.01.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	0	0		
1.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0 0			
1.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	281.150.200	280.764.474	99,86	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				

NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	Realisasi		
		KEUANGAN		FISIK %
		(Rp)	%	
1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				
1.01.02.1.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	20.543.257.417	17.017.196.717	82,84	
1.01.02.1.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.341.046.000	1.107.680.000	82,60	
1.01.02.1.01.04 Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	6.221.644.000	4.373.362.000	70,29	
1.01.02.1.01.05 Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	9.487.220.000	6.974.507.000	73,51	
1.01.02.1.01.06 Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	11.017.560.000	7.636.456.000	69,31	
1.01.02.1.01.07 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	868.324.000	565.395.000	65,11	
1.01.02.1.01.10 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	870.427.000	678.098.000	77,90	
1.01.02.1.01.11 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.403.163.000	1.104.643.000	78,73	
1.01.02.1.01.13 Pembangunan Asrama Sekolah	472.314.000	358.172.000	75,83	
1.01.02.1.01.14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6.774.192.718	4.399.841.718	64,95	
1.01.02.1.01.17 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	322.311.000	236.109.000	73,26	
1.01.02.1.01.19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	15.072.380.000	9.360.005.800	62,10	
1.01.02.1.01.20 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.274.770.000	854.269.000	37,55	
1.01.02.1.01.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	2.277.182.000	1.698.154.000	74,57	
1.01.02.1.01.22 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	849.195.000	517.188.000	60,90	
1.01.02.1.01.23 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	842.124.000	618.459.000	73,44	
1.01.02.1.01.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	386.428.000	286.754.000	74,21	
1.01.02.1.01.25 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	133.332.000	0	0,00	

NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	Realisasi		
		KEUANGAN		FISIK %
		(Rp)	%	
1.01.02.1.01.27 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	583.759.000	92.232.000	15,80	
1.01.02.1.01.28 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1.334.992.000	636.198.000	47,66	
1.01.02.1.01.30 Rehabilitasi Asrama Sekolah	852.243.000	0	0,00	
1.01.02.1.01.31 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.818.677.000	2.411.795.000	50,05	
1.01.02.1.01.36 Pengadaan Mebel Sekolah	7.445.498.300	7.445.019.700	99,99	
1.01.02.1.01.39 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	371.696.800	368.709.600	99,20	
1.01.02.1.01.46 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	4.658.977.055	4.526.087.555	97,15	
1.01.02.1.01.53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	169.272.527.552	164.447.147.945	97,15	
1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		0		
1.01.02.1.02.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah	28.513.104.000	24.167.388.290	84,76	
1.01.02.1.02.04 Pembangunan Ruang Praktik Siswa	24.464.628.000	21.362.038.430	87,32	
1.01.02.1.02.15 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	4.703.294.290	4.199.938.500	89,30	
1.01.02.1.02.28 Pengadaan Mebel Sekolah	10.200.000.000	10.196.976.000	99,97	
1.01.02.1.02.38 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	32.492.752.510	32.225.365.289	99,18	
1.01.02.1.02.45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	341.800.000	322.330.000	94,30	
1.01.02.1.02.46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	139.282.743.346	131.374.198.845	94,32	
1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus				
1.01.02.1.03.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah	2.202.274.700	1.374.646.300	62,42	
1.01.02.1.03.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	143.280.800	121.477.500	84,78	
1.01.02.1.03.10 Pembangunan Kantin Sekolah	1.648.529.600	1.237.079.700	75,04	

NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	Realisasi		
		KEUANGAN		FISIK %
		(Rp)	%	
1.01.02.1.03.15 Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	154.140.000	110.866.600	71,93	
1.01.02.1.03.24 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	123.517.900	54.150.300	43,84	
1.01.02.1.03.35 Pengadaan Mebel Sekolah	651.162.000	651.162.000	100,00	
1.01.02.1.03.40 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	2.803.873.600	2.806.388.037	100,09	
1.01.02.1.03.52 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	14.983.904.000	14.401.573.023	96,11	
1.01.02.1.03.53 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	35.200.000	35.160.000	99,89	
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				
1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah		0		
1.01.03.1.01.02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	76.348.000	73.763.000	96,61	
1.01.03.1.01.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	39.946.000	36.646.000	91,74	
1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi		0		
1.01.04.1.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	85.021.807.500	82.950.061.698	97,56	
1.01.04.1.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	290.030.780	242.787.370	83,71	
1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				
1.01.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				
1.01.05.1.01.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	47.564.200	46.104.200	96,93	
1.01.05.1.01.02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang	1.067.400	624.400	58,50	

NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	Realisasi		
		KEUANGAN		FISIK %
		(Rp)	%	
Diselenggarakan oleh Masyarakat				
1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13.237.000	13.237.000	100,00	
1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.556.200	15.559.000	75,69	
1.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.019.800	5.391.800	67,23	
1.01.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	1.200.000	0	0,00	
1.01.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	2.700.000	2.625.000	97,22	
1.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	127.978.800	41.584.480	32,49	
1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000	100,00	
1.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.000.000	60.000.000	100,00	
1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.430.000	29.295.510	99,54	
1.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.220.000	1.220.000	100,00	
1.01.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	4.110.000	2.295.000	55,84	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				

NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	Realisasi		
		KEUANGAN		FISIK %
		(Rp)	%	
1.01.02.1.01.51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	46.048.000	45.566.500	98,95	
1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				
1.01.02.1.02.43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	45.000.000	44.800.000	99,56	
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
2.22.02.1.03.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	815.000.000	769.638.000	94,43	
2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
2.22.03.1.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	107.435.800	92.944.400	86,51	
2.22.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi				
2.22.04.1.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	105.697.700	95.584.693	90,43	
2.22.05.1.02.02 Pengembangan Cagar Budaya	70.599.800	67.834.000	96,08	
2.22.02.1.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	547.580.000	545.276.000	99,58	

3.8. Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTB tahun 2018 s.d 2023

Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB tertuang dalam Tabel berikut di bawah ini. Dalam tabel tersebut menggambarkan bahwa jumlah anggaran yang tersedia di dalam DPA tahun tersebut dan jumlah prosentase realisasi keuangan dan realisasi fisik dalam anggaran pada tahun-tahun tersebut.

Tabel. 10 Jumlah dan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB Dari Tahun 2018 Sampai Dengan 2023

No.	Tahun Anggaran	Anggaran	Persentase Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan	Persentase Realisasi Fisik	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	2018	1,205,298,953,454.00	95.41%	1,148,288,312,955.63	98.95 %	
2	2019	1,240,254,550,830.00	96.04 %	1,232,440,947,159.77	99.37 %	
3	2020	1,257,305,198,489.00	98.32%	1,123,025,003,290.37	99.84 %	
4	2021	2,008,559,191,955.00	98.01%	1,968,588,864,035.10	98.44%	
5	2022	1.615.948.287.284,00	89.34 %	1.443.642.916.580	99.71 %	
6	2023	1.832.672.506.269,-				

3.9. Efisiensi Anggaran Dinas Dikbud Prov. NTB tahun 2022

Tabel 11. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

NO	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/Sub Kegiatan	TARGET kinerja	REALISASI kinerja	CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	Relevansi dengan kondisi kinerja	EFISIENSI	Ket
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1,615,948,287,284.00	1,443,642,916,580.00	89.34	relevan	172,305,370,704.00	
SEKRET	1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
SEKRET	1.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	100%	36,350,000	36,335,000	99.96	relevan	15,000.00	
SEKRET	1.01.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	100%	37,505,000	37,445,000	99.84	relevan	60,000.00	
SEKRET	1.01.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	100%	46,560,000	46,500,000	99.87	relevan	60,000.00	
SEKRET	1.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4	4	100%	41,745,000	41,725,000	99.95	relevan	20,000.00	
SEKRET	1.01.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	1	100%	42,785,000	42,725,000	99.86	relevan	60,000.00	
SEKRET	1.01.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	100%	21,975,000	21,855,000	99.45	relevan	120,000.00	
SEKRET	1.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	100%	193,849,800	193,834,800	99.99	relevan	15,000.00	

SEKRET	1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
SEKRET	1.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7288	7288	100%	976,888,245,556	858,481,653,324	87.88		118,406,592,232.00	
SEKRET	1.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	270	270	100%	1,995,382,500	1,991,240,300	99.79		4,142,200.00	
SEKRET	1.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1650	1650	100%	16,800,600	16,688,600	99.33		112,000.00	
SEKRET	1.01.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100%	13,073,000	13,073,000	100.00		-	
SEKRET	1.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	25	25	100%	17,751,300	17,537,800	98.80		213,500.00	
SEKRET	1.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16	16	100%	20,846,600	20,682,300	99.21		164,300.00	
SEKRET	1.01.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	100%	8,567,400	8,515,400	99.39		52,000.00	
SEKRET	1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
SEKRET	1.01.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	100%	7,648,500	7,596,500	99.32		52,000.00	
SEKRET	1.01.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	544	544	100%	78,094,100	77,789,451	99.61		304,649.00	
SEKRET	1.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	100%	169,263,000	169,046,479	99.87		216,521.00	
SEKRET	1.01.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah									

SEKRET	1.01.01.1.04.05 Pengolahan Data Retribusi Daerah	480	480	100%	4,762,200	4,762,200	100.00		-	
SEKRET	1.01.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	1	100%	8,989,000	8,989,000	100.00		-	
SEKRET	1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
SEKRET	1.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50	50	100%	149,969,300	148,687,700	99.15		1,281,600.00	
SEKRET	1.01.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1045	1045	100%	61,457,500	59,377,500	96.62		2,080,000.00	
SEKRET	1.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1	100%	8,551,200	8,551,200	100.00		-	
SEKRET	1.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1	1	100%	5,800,000	5,800,000	100.00		-	
SEKRET	1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah									
SEKRET	1.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9	9	100%	20,685,000	20,685,000	100.00		-	
SEKRET	1.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7	7	100%	20,300,000	20,298,570	99.99		1,430.00	
SEKRET	1.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17	17	100%	670,482,000	670,347,000	99.98		135,000.00	
SEKRET	1.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4	4	100%	29,695,000	29,238,000	98.46		457,000.00	
SEKRET	1.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	720	720	100%	186,945,000	164,880,000	88.20		22,065,000.00	
SEKRET	1.01.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	4	4	100%	50,300,000	42,792,500	85.07		7,507,500.00	
SEKRET	1.01.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	2	2	100%	56,700,000	56,700,000	100.00		-	

SEKRET	1.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	4	100%	517,155,200	483,819,840	93.55		33,335,360.00	
SEKRET	1.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0					
SEKRET	1.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	250	250	100%	34,445,000	26,920,000	78.15		7,525,000.00	
SEKRET	1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
SEKRET	1.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7	7	100%	185,550,000	185,354,690	99.89		195,310.00	
SEKRET	1.01.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud	3	3	100%	135,000,000	134,004,750	99.26		995,250.00	
SEKRET	1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
SEKRET	1.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	240	240	100%	24,978,000	11,752,135	47.05		13,225,865.00	
SEKRET	1.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4	4	100%	525,080,000	507,419,918	96.64		17,660,082.00	
SEKRET	1.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	4	100%	113,250,000	112,184,000	99.06		1,066,000.00	
SEKRET	1.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	156	156	100%	2,839,511,160	2,476,253,480	87.21		363,257,680.00	
SEKRET	1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
SEKRET	1.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35	35	100%	394,370,000	354,474,917	89.88		39,895,083.00	

SEKRET	1.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120	120	100%	98,575,200	95,910,200	97.30		2,665,000.00	
SEKRET	1.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				281,150,200	280,764,474	99.86		385,726.00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									
SMA	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas									
SMA	1.01.02.1.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	69	23	33%	20,543,257,417	17,017,196,717	82.84		3,526,060,700.00	
SMA	1.01.02.1.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	5	0	0%	1,341,046,000	1,107,680,000	82.60		233,366,000.00	
SMA	1.01.02.1.01.04 Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	17	0	0%	6,221,644,000	4,373,362,000	70.29		1,848,282,000.00	
SMA	1.01.02.1.01.05 Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	26	0	0%	9,487,220,000	6,974,507,000	73.51		2,512,713,000.00	
SMA	1.01.02.1.01.06 Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	29	0	0%	11,017,560,000	7,636,456,000	69.31		3,381,104,000.00	
SMA	1.01.02.1.01.07 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	4	0	0%	868,324,000	565,395,000	65.11		302,929,000.00	
SMA	1.01.02.1.01.10 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	3	0	0%	870,427,000	678,098,000	77.90		192,329,000.00	
SMA	1.01.02.1.01.11 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	6	0	0%	1,403,163,000	1,104,643,000	78.73		298,520,000.00	
SMA	1.01.02.1.01.13 Pembangunan Asrama Sekolah	1	0	0%	472,314,000	358,172,000	75.83		114,142,000.00	
SMA	1.01.02.1.01.14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	34	4	12%	6,774,192,718	4,399,841,718	64.95		2,374,351,000.00	

SMA	1.01.02.1.01.17 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	1	0	0%	322,311,000	236,109,000	73.26		86,202,000.00	
SMA	1.01.02.1.01.19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	115	2	2%	15,072,380,000	9,360,005,800	62.10		5,712,374,200.00	
SMA	1.01.02.1.01.20 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	13	0	0%	2,274,770,000	854,269,000	37.55		1,420,501,000.00	
SMA	1.01.02.1.01.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	11	0	0%	2,277,182,000	1,698,154,000	74.57		579,028,000.00	
SMA	1.01.02.1.01.22 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	4	0	0%	849,195,000	517,188,000	60.90		332,007,000.00	
SMA	1.01.02.1.01.23 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	4	0	0%	842,124,000	618,459,000	73.44		223,665,000.00	
SMA	1.01.02.1.01.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	3	0	0%	386,428,000	286,754,000	74.21		99,674,000.00	
SMA	1.01.02.1.01.25 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	1	0	0%	133,332,000	0	0.00		133,332,000.00	
SMA	1.01.02.1.01.27 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	4	0	0%	583,759,000	92,232,000	15.80		491,527,000.00	
SMA	1.01.02.1.01.28 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	8	0	0%	1,334,992,000	636,198,000	47.66		698,794,000.00	
SMA	1.01.02.1.01.30 Rehabilitasi Asrama Sekolah	3	0	0%	852,243,000	0	0.00		852,243,000.00	
SMA	1.01.02.1.01.31 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	53	0	0%	4,818,677,000	2,411,795,000	50.05		2,406,882,000.00	
SMA	1.01.02.1.01.36 Pengadaan Mebel Sekolah	113	113	100%	7,445,498,300	7,445,019,700	99.99		478,600.00	

SMA	1.01.02.1.01.39 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1	1	100%	371,696,800	368,709,600	99.20	2,987,200.00
SMA	1.01.02.1.01.45 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas				0	0		-
SMA	1.01.02.1.01.46 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	48	48	100%	4,658,977,055	4,526,087,555	97.15	132,889,500.00
SMA	1.01.02.1.01.53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	105	105	100%	169,272,527,552	164,447,147,945	97.15	4,825,379,607.00
SMK	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					0		-
SMK	1.01.02.1.02.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah	96	93.61	98%	28,513,104,000	24,167,388,290	84.76	4,345,715,710.00
SMK	1.01.02.1.02.04 Pembangunan Ruang Praktik Siswa	24	22.9	95%	24,464,628,000	21,362,038,430	87.32	3,102,589,570.00
SMK	1.01.02.1.02.15 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	36	35.6	99%	4,703,294,290	4,199,938,500	89.30	503,355,790.00
SMK	1.01.02.1.02.28 Pengadaan Mebel Sekolah	156	156	100%	10,200,000,000	10,196,976,000	99.97	3,024,000.00
SMK	1.01.02.1.02.38 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	37	37	100%	32,492,752,510	32,225,365,289	99.18	267,387,221.00
SMK	1.01.02.1.02.45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				341,800,000	322,330,000	94.30	19,470,000.00
SMK	1.01.02.1.02.46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				139,282,743,346	131,374,198,845	94.32	7,908,544,501.00
PK	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus							-

PK	1.01.02.1.03.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah	12	0	0%	2,202,274,700	1,374,646,300	62.42	827,628,400.00
PK	1.01.02.1.03.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1	0	0%	143,280,800	121,477,500	84.78	21,803,300.00
PK	1.01.02.1.03.10 Pembangunan Kantin Sekolah	8	0	0%	1,648,529,600	1,237,079,700	75.04	411,449,900.00
PK	1.01.02.1.03.15 Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	1	0	0%	154,140,000	110,866,600	71.93	43,273,400.00
PK	1.01.02.1.03.24 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1	0	0%	123,517,900	54,150,300	43.84	69,367,600.00
PK	1.01.02.1.03.35 Pengadaan Mebel Sekolah	22	22	100%	651,162,000	651,162,000	100.00	-
PK	1.01.02.1.03.40 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	50	50	100%	2,803,873,600	2,806,388,037	100.09	(2,514,437.00)
PK	1.01.02.1.03.52 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	3,609	3,609	100%	14,983,904,000	14,401,573,023	96.11	582,330,977.00
PK	1.01.02.1.03.53 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	4	4	100%	35,200,000	35,160,000	99.89	40,000.00
	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM							-
SMA	1.01.03.1.01.02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah				76,348,000	73,763,000	96.61	2,585,000.00
SMK	1.01.03.1.01.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah				39,946,000	36,646,000	91.74	3,300,000.00
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					0		-

GTK	1.01.04.1.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	7	7	100%	85,021,807,500	82,950,061,698	97.56		2,071,745,802.00	
GTK	1.01.04.1.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	3	3	100%	290,030,780	242,787,370	83.71		47,243,410.00	
GTK	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN								-	
GTK	1.01.05.1.01.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	5	5		47,564,200	46,104,200	96.93		1,460,000.00	
GTK	1.01.05.1.01.02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	5	5		1,067,400	624,400	58.50		443,000.00	
KEBUD	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								-	
KEBUD	2.22.02.1.03.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	12	10		815,000,000	769,638,000	94.43		45,362,000.00	
KEBUD	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL								-	
KEBUD	2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota								-	
KEBUD	2.22.03.1.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	100	180		107,435,800	92,944,400	86.51		14,491,400.00	
KEBUD	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH								-	
KEBUD	2.22.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi								-	
KEBUD	2.22.04.1.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	450	482		105,697,700	95,584,693	90.43		10,113,007.00	

KEBUD	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA								-	
KEBUD	2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi								-	
KEBUD	2.22.05.1.02.02 Pengembangan Cagar Budaya	10	10		70,599,800	67,834,000	96.08		2,765,800.00	

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan atas Capaian Kinerja

Tahun 2022, adalah tahun masa transisi dari masa Pandemi Covid 19 dengan memasuki masa endemi Covid 19, Pemerintah Republik Indonesia memberi slogan **Pulih lebih cepat Bangkit lebih Kuat** tantangan dan ujian yang dihadapi Rakyat Indonesia khususnya Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sangatlah berat selain harus berjuang dengan dana yang besar untuk mengatasi Pandemi Covid 19 juga bertahan untuk memulihkan perekonomian rakyat yang sudah menurun drastis. Dengan slogan tersebut memberikan semangat untuk bangkit mampu bertahan dan lebih kuat lagi di tahun 2022 ini.

Pada tahun 2022 ini angka capaian kinerja masih menunjukkan peningkatan bisa dilihat pada keterangan di atas. Pada tahun ini baru pertama kali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat mengadakan Tracer Study atau penelusuran Alumni SMA yang melanjutkan dan Alumni SMK terserap dengan kriteria lulus bekerja, melanjutkan dan berwirausaha. Presentase SMA masih belum mencapai target maksimal yakni 100 % dari yang tahun sebelumnya 65 % menjadi 66 % sedangkan untuk SMK telah melampaui target yakni 35 % menjadi 35,31 % sehingga untuk tahun selanjutnya perlu dilanjutkan lagi Program Tracer Study ini dengan perbaikan dan sosialisasi kepada semua Sekolah-sekolah Negeri maupun Swasta yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut di atas terdapat berbagai permasalahan dan kendala namun secara singkat dapat dinyatakan bahwa penyebab utama adalah keterbatasan anggaran sehingga perlu langkah – langkah efektif dan efisiensi bahkan penentuan prioritas yang tentunya mengakibatkan pencapaian indikator kinerja terganggu. Namun Dikbud NTB setiap tahunnya didukung oleh Dana Alokasi Khusus fisik terutama untuk revitalisasi sekolah menengah serta Dana Alokasi Khusus non fisik untuk bantuan biaya operasional sekolah, pengelolaan Museum, dan Taman Budaya.

2. Langkah ke depan dalam meningkatkan capaian kinerja Dinas Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pendataan adalah hal yang paling berperan penting dalam menentukan rumusan suatu capaian kinerja dalam suatu OPD dan kerjasama yang baik serta koordinasi dari berbagai pihak yang saling berhubungan.

Pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan diperlukan pendataan yang baik melalui Operator Sekolah lewat Dapodikdasmen, Emis oleh Kementerian Agama serta Dapodikdasmen tiap Kabupaten/kota. Untuk itu diperlukannya langkah-langkah yang tepat diantaranya adalah :

4. Telah dilakukannya MOU dengan Pihak dari Pusdatin
5. Koordinasi yang baik dengan pihak Kementerian Agama Provinsi NTB
6. Koordinasi dengan Dukcapil Provinsi NTB
7. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Provinsi NTB

Besar harapan dengan adanya MOU serta koordinasi dengan berbagai pihak diharapkan dapat meningkatkan kualitas data yang baik sehingga capaian kinerja tahun-tahun mendatang dapat meningkat yang berimplikasi terhadap kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Amin